

**PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN LLPDS TERHADAP
BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT**

Monika Alberta Nadia Taruk¹

Ni Nyoman Reni Suasih²

^{1,2}FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal. Namun, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, jumlah penduduk, dan pendapatan sah lainnya terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT periode 2020-2024 menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *common effect model (CEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara parsial, PAD, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi PAD dan meningkatkan efisiensi belanja daerah guna memperkuat kemandirian fiskal berkelanjutan di NTT.

Kata kunci: kemandirian fiskal daerah, belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, jumlah penduduk, lain-lain pendapatan yang sah

Klasifikasi JEL: H7, H71, J1

ABSTRACT

Fiscal independence is a key indicator of the success of fiscal decentralization. However, East Nusa Tenggara Province still faces high dependence on central government transfers. This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD), balancing funds, population, and other legitimate revenues on regional expenditure in regencies/cities in East Nusa Tenggara Province for the period 2020-2024 using multiple linear regression analysis with the common effect model (CEM) method. The results show that simultaneously, all four variables have a significant effect on regional expenditure. Partially, PAD, balancing funds, and other legitimate income have a positive and significant effect, while population size does not have a significant effect. Local governments are expected to optimize the potential of PAD and improve the efficiency of regional spending in order to strengthen sustainable fiscal independence in NTT.

Keywords: regional fiscal independence, regional expenditure, local revenue, balancing funds, population size, other legitimate income

Klasifikasi JEL: H7, H71, J

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan tonggak penting dalam memperkuat desentralisasi fiskal. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas belanja daerah, menyelaraskan hubungan fiskal dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan penyediaan layanan publik daerah (Lewis, 2023). Melalui desentralisasi, pemerintah daerah berupaya secara berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayahnya. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, desentralisasi memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah (Wahyudi & Kurniawati, 2022). Desentralisasi harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas dengan tujuan akhir mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Irawan, 2015).

Menurut Halim (2018), kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa perlu mengandalkan transfer dari pusat. Dengan demikian, kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana otonomi daerah telah berhasil diwujudkan.

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai kemandirian fiskal adalah Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) atau *Fiscal Autonomy Index (FAI)* yang diperkenalkan oleh Hunter (1977). IKF dihitung melalui rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi nilai indeks tersebut, semakin mandiri daerah dalam membiayai pengeluarannya. Purba (2025) menegaskan bahwa IKF tidak hanya menggambarkan kapasitas fiskal, tetapi juga mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk dijadikan sumber pembiayaan pembangunan. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mayoritas daerah di Indonesia, terutama di kawasan timur, masih menghadapi kesulitan dalam meningkatkan PAD sehingga ketergantungan pada Dana

Perimbangan tetap tinggi (Syamsul, 2020). Kondisi ini juga terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2023), IKF NTT dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada kategori sangat rendah meskipun menunjukkan sedikit tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur keuangan daerah masih belum mampu menopang kemandirian fiskal secara optimal. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 1, indeks kemandirian fiskal provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024. Dapat dilihat pada tabel 1, bahwa kemandirian fiskal di NTT pada tahun 2020 sebesar 0,2152 dalam kategori belum mandiri, tahun 2021 sedikit meningkat tetapi masih dalam kategori belum mandiri. Kemudian tahun 2022-2024 IKF meningkat lagi dan memasuki kategori menuju kemandirian (DIKJN Kementerian Keuangan, 2025).

Hadia,U. *et al.* (2024) menjelaskan bahwa belanja daerah di NTT cenderung meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Namun, kapasitas fiskal yang terbatas menyebabkan pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola berbagai sumber pendapatannya secara efektif demi mendukung pelaksanaan program pembangunan. Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan sah lainnya.

Sumber penerimaan PAD Provinsi NTT telah memberikan kontribusi yang signifikan, akan tetapi perannya belum cukup kuat dalam menopang APBD secara keseluruhan, sehingga ketergantungan anggaran belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dana Alokasi Umum (DAU) masih sangat besar. Dengan kata lain, kemampuan daerah dalam mengandalkan sumber pembiayaan belanja daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan Provinsi NTT terhadap pendapatan dari Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah masih tinggi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD masih sulit dilakukan karena transfer dana dari pusat seperti DAU, bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Khusus maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah, bahkan termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Ursula *at all*, 2024).

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah proses penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur pendapatan, membelanjakan anggaran, dan menyusun kebijakan keuangan secara mandiri guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan efektif dan efisien. Menurut Oates (1972), pemberian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah memungkinkan pelayanan publik lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, karena pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan warganya. Musgrave dan Musgrave (1989), menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pembagian tanggung jawab keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam aspek pengumpulan pendapatan maupun pengalokasian pengeluaran. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tercipta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya publik dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah

Menurut UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Indikator belanja daerah terdiri dari total belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini (Saleh, 2003).

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dana perimbangan merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan total individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, baik yang berdomisili tetap maupun sementara (BPS, 2023). Selanjutnya menurut Koesmanto (1995) mengatakan jumlah penduduk adalah angka yang menunjukkan total individu yang menempati suatu wilayah tertentu, yang diperoleh melalui sensus atau metode pencatatan lainnya. Data jumlah penduduk sangat penting untuk menyusun kebijakan publik yang efektif, termasuk perencanaan anggaran daerah dan belanja publik.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah komponen pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber selain PAD dan transfer, dan diakui secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Setiap pengeluaran daerah wajib terlebih dahulu dialokasikan dalam APBD.

Secara keseluruhan, variabel PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dipilih karena mewakili sumber-sumber utama pendapatan daerah dan faktor penentu kebutuhan fiskal yang berpengaruh langsung terhadap besarnya belanja daerah.

Analisis terhadap variabel-variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara kapasitas pendapatan dan kebijakan belanja daerah, serta menjadi dasar bagi upaya peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dan kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi NTT.

Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan fiskal lokal. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat termasuk DAU, DAK, dan DBH berpotensi menghambat kemandirian fiskal dan menciptakan perilaku fiskal yang tidak berkelanjutan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Dengan demikian, penting untuk meneliti secara empiris bagaimana pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Penelitian ini penting dilakukan karena tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas, sehingga perlu dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi belanja daerah. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun turut mendorong meningkatnya kebutuhan belanja publik di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Komponen lain seperti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDS) juga perlu dianalisis karena memiliki peran penting dalam memberikan fleksibilitas fiskal, terutama pada situasi darurat atau krisis. Penelitian ini juga penting mengingat adanya ketimpangan fiskal antar kabupaten/kota di NTT yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan LLPDS terhadap belanja daerah, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal, efisiensi pengelolaan keuangan, dan kinerja pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel independen dan dependen, yaitu pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder berupa data panel dari 22 Kabupaten/Kota selama periode 2020–2024 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan dan BPS NTT, dengan jumlah total pengamatan 110 pengamatan. Data diolah menggunakan metode **Common Effect Model (CEM)** dengan analisis regresi linear berganda melalui program **Eviews 9**

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1: Analisis Statistik Deskriptif

	PAD	Dana Perimbangan	Jumlah Penduduk	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Belanja Daerah
Mean	6705.255	84814.59	22420.42	5710.691	97530.74
Median	5528.000	88611.50	22566.50	4758.000	102555.5
Maximum	24324.00	127546.0	48128.00	25343.00	151413.0
Minimum	962.0000	30795.00	1451.000	365.0000	35079.00
Std. Dev.	4525.012	19449.06	11401.68	3738.886	24205.39
Skewness	1.798555	-0.036461	0.147929	2.123904	-0.086447
Kurtosis	6.443495	2.606184	2.538364	10.12784	2.494193
Jarque-Bera	113.6523	0.735207	1.377930	315.5621	1.309613
Probability	0.000000	0.692392	0.502096	0.000000	0.519543
Sum	737578.0	9329605.	2466246.	628176.0	10728381
Sum Sq. Dev.	2.23E+09	4.12E+10	1.42E+10	1.52E+09	6.39E+10
Observations	110	110	110	110	110

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Uji Chow

Tabel 2: Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.676885	(21,84)	0.8440
Cross-section Chi-square	17.197181	21	0.6991

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 2, diperoleh nilai probabilitas *cross section chi square* sebesar $0,6991 > 0,05$, maka H_0 diterima maka model yang terpilih adalah *common effect model*.

Uji Hausman

Tabel 3: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.264322	4	0.1226

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji Hausman pada tabel 3, diperoleh nilai probabilitas *cross section random* sebesar $0,1226 > 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model *random effect model* terpilih menjadi model yang terbaik untuk digunakan.

Uji Lagrange Multiplier

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier pada tabel 4, diperoleh nilai probabilitas *cross section Breusch-Pagan* sebesar $0,1541 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti

model *Common Effect Model* terpilih menjadi model yang terbaik untuk digunakan.

Tabel 4: Hasil Uji Lagrange Multiplier

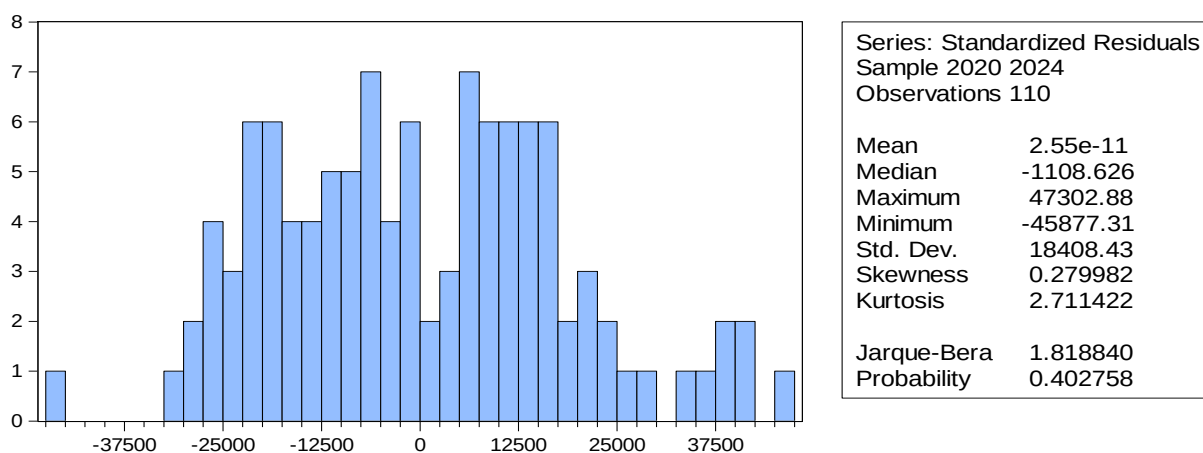
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	2.030783 (0.1541)	4.326784 (0.0375)	6.357567 (0.0117)

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Dari hasil ketiga uji pemilihan model, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*, dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah model yang diperoleh berdasarkan *Common Effect Model*.

Uji Normalitas

Gambar 1: Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan gambar 1, hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 1,818840 dengan probabilitas $0,402758 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Tabel 5: Uji Multikolineritas

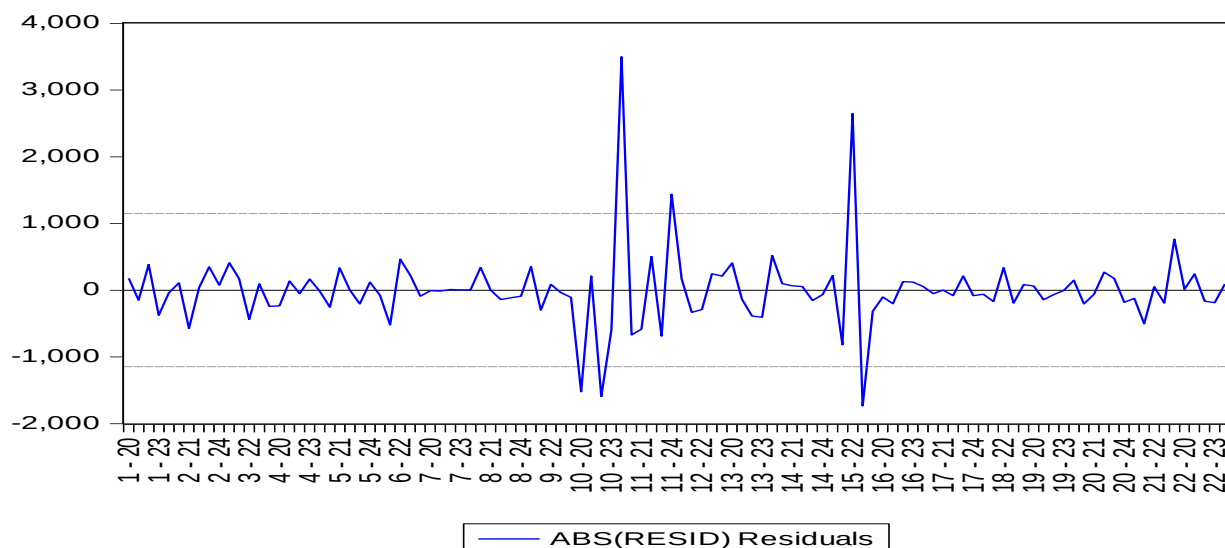
	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.325012	0.286840	0.325922
X2	0.325012	1.000000	0.614080	0.216464
X3	0.286840	0.614080	1.000000	0.253034
X4	0.325922	0.216464	0.253034	1.000000

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa koefisien korelasi PAD (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) sebesar $0,325012 < 0,90$, koefisien korelasi PAD (X_1) dan Jumlah Penduduk (X_3) sebesar $0,286840 < 0,90$, koefisien korelasi PAD (X_1) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (X_4) sebesar $0,325922 < 0,90$. Koefisien korelasi Dana Perimbangan (X_2) dan jumlah penduduk (X_3) sebesar $0,614080 < 0,90$, koefisien korelasi dana perimbangan (X_2) dan lain-lain pendapatan yang sah (X_4) sebesar $0,216464 < 0,90$, serta koefisien jumlah penduduk (X_3) dan lain-lain pendapatan yang sah (X_4) sebesar $0,253034 < 0,90$. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari multikolineritas atau lolos uji multikolineritas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 2: Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Dari grafik uji heterokedastisitas di atas dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Konstanta sebesar -1836,494 memiliki arti jika variabel PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2), Jumlah Penduduk (X_3), dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_4) bernilai nol, maka variabel Belanja Daerah (Y) akan bernilai sebesar -1836,494. Nilai koefisien variabel PAD (X_1) bernilai positif sebesar 1,1177 memiliki arti jika PAD meningkat satu satuan, maka belanja daerah meningkat sebesar 1,1177. Nilai koefisien variabel Dana Perimbangan (X_2) bernilai positif sebesar 1,0126 memiliki arti jika Dana Perimbangan meningkat satu satuan, maka belanja daerah meningkat sebesar 1,0126. Nilai koefisien variabel Jumlah Penduduk (X_3) bernilai positif sebesar 0,0341 memiliki arti jika Jumlah Penduduk meningkat satu satuan, maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0,0341. Nilai koefisien variabel Lain-lain Pendapatan yang Sah bernilai positif sebesar 0,9138 memiliki arti jika Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat satu satuan, maka belanja daerah meningkat sebesar 0,9138.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 6, diperoleh persamaan regresi data panel yaitu:

$$Y = -1836,494 + 1,1177 X_{1it} + 1,0126 X_{2it} + 0,0341 X_{3it} + 0,9138 X_{4it} + U_{it}$$

Tabel 6: Hasil analisis regresi data panel (*common effect model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1836.494	3000.671	-0.612028	0.5418
PAD	1.117775	0.158295	7.061358	0.0000
Dana Perimbangan	1.012661	0.043138	23.47480	0.0000
Jumlah Penduduk	0.034122	0.073231	0.465944	0.6422
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0.913867	0.186585	4.897871	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Uji Pengaruh Simultan (Uji-F)**Pengaruh Simultan PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara simultan variabel PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 321.5473 > F_{tabel} sebesar 2,6903 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 7: Hasil Uji F

R-squared	0.924525
Adjusted R-squared	0.924525
S.E. of regression	6775.356
Sum squared resid	4.82E+09
Log likelihood	-1123.840
F-statistic	321.5473
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Uji Pengaruh Parsial (Uji-T)**Tabel 8: Hasil uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob
C	-1836.494	3000.671	-0.612028	0.5418
PAD	1.117775	0.158295	7.061358	0.0000
Dana Perimbangan	1.012661	0.043138	23.47480	0.0000
Jumlah Penduduk	0.034122	0.073231	0.465944	0.6422
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0.913867	0.186585	4.897871	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara parsial variabel PAD memiliki nilai koefisien regresi 1,1177 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya setiap peningkatan PAD sebesar 1 miliar akan meningkatkan belanja sebesar 1,1177 miliar, dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil ini mendukung prinsip utama desentralisasi fiskal, yaitu kemandirian fiskal. Semakin besar PAD yang dimiliki oleh suatu daerah, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Hasil ini sesuai dengan hipotesis di awal penelitian ini dan juga hasil dari penelitian sebelumnya yang dijelaskan oleh Handayani *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian dari Yuliana & Asmara (2024) juga mengatakan hal yang sama bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini karena PAD secara keseluruhan berkontribusi dalam penyelenggaraan belanja daerah. Perkembangan PAD selama tahun 2020-2024 di beberapa daerah di NTT berfluktuasi. Meningkatnya PAD setiap tahunnya menandakan suatu daerah dapat mandiri dalam memenuhi pembiayaan belanja daerahnya. Karena diketahui bahwa PAD adalah sumber penerimaan untuk mencukupi keperluan daerah, sehingga dapat menentukan meningkat dan menurunnya belanja daerah (Putra & Dewi, 2018).

Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk PAD ditopang oleh pajak daerah termasuk didalamnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKBNB). PAD memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kapasitas belanja daerah (Halim, 2016). Selaras dengan penelitian (Dahlia, 2022) mendapatkan hasil PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, akibatnya terjadinya penurunan dan peningkatan PAD dapat mempengaruhi belanja daerah. Hal ini juga selaras dengan penelitian dari (Aulia, 2024) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah

artinya, kenaikan PAD berdampak langsung pada peningkatan belanja daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil secara parsial bahwa variabel dana perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 1,0126 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peningkatan dana perimbangan sebesar 1 miliar akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,0126 miliar rupiah.

Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya dana perimbangan memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperluas kapasitas fiskalnya dalam memenuhi kebutuhan layanan publik. Transfer meningkatkan likuiditas dan ruang fiskal daerah sehingga kepala daerah dan legislator daerah mampu mengalokasikan lebih banyak belanja pada fungsi-fungsi prioritas (pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur), khususnya jika transfer bersifat tidak bersyarat atau relatif mudah diserap.

Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya transfer fiskal antar daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik secara efisien. Pendekatan teori *flypaper effect* juga relevan-transfer pusat cenderung “menempel” pada belanja publik di tingkat daerah sehingga berdampak langsung pada peningkatan pengeluaran daerah. Temuan tersebut didukung oleh sejumlah studi empiris di konteks Indonesia yang menemukan hubungan positif dan/atau efek substantif dana perimbangan terhadap belanja daerah. Misalnya, Yuliana & Asmara (2024) menunjukkan bahwa dana perimbangan berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada tingkat provinsi.

Secara data administrasi dan laporan APBD, Provinsi dan kabupaten/kota di NTT menunjukkan ketergantungan substansial pada dana perimbangan sebagai porsi penting dari total pendapatan daerah, sehingga setiap fluktuasi alokasi transfer pusat langsung memengaruhi kapasitas belanja daerah di NTT. Dokumen realisasi APBD dan publikasi BPS Provinsi NTT (realisasi pendapatan dan belanja kabupaten/kota) memperlihatkan bahwa porsi dana perimbangan cukup material dalam struktur penerimaan daerah di NTT, yang menjelaskan

mengapa efek transfer pada belanja menjadi terlihat kuat di wilayah ini. Secara situasional, NTT menghadapi kebutuhan besar untuk belanja infrastruktur dasar, layanan sosial, dan penanganan kemiskinan/ketertinggalan wilayah, kebutuhan yang kerap dibiayai dari aliran dana perimbangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis di awal penelitian ini dan penelitian terdahulu bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Razani et al. (2024) menemukan bahwa peningkatan dana perimbangan meningkatkan alokasi belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja publik lainnya. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Handayani *et. al.* (2024) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya, kenaikan Dana Perimbangan berkorelasi dengan peningkatan realisasi belanja daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat melalui mekanisme perimbangan keuangan sangat berperan dalam memperkuat kapasitas belanja daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil secara parsial bahwa variabel jumlah penduduk memiliki koefisien regresi sebesar 0,034122 dan probabilitas $0,6422 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika jumlah penduduk meningkat 0,64 ribu jiwa, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,034 miliar rupiah.

Jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat diartikan bahwa jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya tetapi tidak membuat belanja daerah meningkat dengan signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Yuliana & Amara (2024), Safa'ah dkk (2021), Lestari & Wulandari (2024) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun hasil ini tidak sesuai dengan penelitian dari Dahliah (2022) bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, karena peningkatan populasi secara langsung menambah kebutuhan

pelayanan publik. Perbedaan hasil tersebut menegaskan bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal serta kondisi ekonomi daerah.

Meskipun jumlah penduduk di NTT meningkat dari tahun ke tahun, laju pertumbuhannya relatif stabil sehingga tidak menimbulkan lonjakan kebutuhan belanja yang besar. Meskipun jumlah penduduk bertambah, belanja daerah lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur antar wilayah daripada peningkatan layanan berdasarkan pertumbuhan penduduk.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil secara parsial bahwa variabel lain-lain pendapatan yang sah memiliki koefisien regresi sebesar 0,913867 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peningkatan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1 miliar, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,913 miliar rupiah.

Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya Musviyanti et al., (2022) menemukan bahwa LLPDS berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa, karena dana hibah dan penerimaan sah lainnya sering digunakan untuk menutup kekurangan belanja rutin maupun modal. Fitriani dan Puspita (2021) juga menemukan bahwa LLPDS memiliki kontribusi positif terhadap modal belanja, meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan PAD dan dana perimbangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Ramadhan, M.N & Rahardjo, S.N (2024) menemukan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara teoritis, peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat memperbesar kapasitas fiskal pemerintah daerah, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan belanja daerah, baik untuk belanja operasional, belanja modal, maupun belanja publik lainnya (Hadyatno et al., 2020). Dengan tambahan penerimaan ini, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, tidak terduga, ataupun sebagai

pelengkap dari sumber pendanaan utama.

Hal ini sejalan dengan situasi di NTT di mana LLPDS digunakan (meskipun dalam porsi kecil) untuk mendukung belanja daerah. Karena daerah seperti NTT memiliki PAD dan transfer yang dominan, LLPDS bisa bertindak sebagai pengisi gap ketika komponen lain tidak mencukupi, misalnya saat refocusing anggaran, atau saat PAD tumbuh lambat.

Analisis Koefisien Determinan

Tabel 9: Hasil analisis koefisien determinan (R^2)

R-squared	0.924525
Adjusted R-squared	0.921650

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan tabel 9, terdapat hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,921650 atau sebesar 92,16 persen. Hal ini memiliki arti bahwa 92,16 persen total variasi (turun naiknya) belanja daerah dapat dijelaskan atau dipengaruhi secara serempak oleh PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sisanya sebesar 7,84 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dalam menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Variabel jumlah penduduk, berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

SARAN

Pemerintah daerah di Provinsi NTT perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak, perbaikan administrasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana perimbangan perlu diimbangi dengan strategi diversifikasi sumber pendapatan agar alokasi belanja lebih fleksibel. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat harus diantisipasi melalui perencanaan belanja berbasis kebutuhan (*need-based budgeting*) sehingga pelayanan publik lebih merata dan efektif.

Penelitian ini masih terbatas pada variabel PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan LLPDS dalam periode tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menggunakan periode data yang lebih panjang agar hasil analisis lebih komprehensif.

REFERENSI

- Aulia, Y., Nasution, A. P., & Ramadhan, P. R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(8), 3449–3456
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2750-2761.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Two decades of fiscal decentralization in Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, June 14). *Pemerintah komit perkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/06/14/4401-pemerintah-komit-perkuat-harmonisasi-kebijakan-fiskal-pusat-dan-daerah>

- DPR RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Hadia, U., Tameno, N., & Tungga, C. A. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 149–168.
- Hadiyatno, D., Susiswo, S., Patimah, S., Nainggolan, H., & Ernayani, R. (2020). The effect of local taxes, regional retribution, and other legal district own source revenues on the increase of district own source revenue. *Humanities and Social Sciences*, 8(10), 426-431
- Halim, A. (Ed.). (2016). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah) (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Ardita & Suryati, Tri & Marsela, Hera & Luqmana, Dani & Anwar, Saiful. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *SOROT*. 17. 41. 10.31258/sorot.17.1.41-57.
- Handayani, L., Bainil Yulina, & Anggeraini Oktarida. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), 3078–3090.
- Irawan, A. (2015). Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), 148–149.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Data Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024*. Jakarta: DJPK.
- Kii, H. E., Harmon, H., & Sumanky, M. (2022). The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Revenues on Regional Independence Through Direct Expenditure (Empire Study: District/City Governments in East Nusa Tenggara Province). *European Journal of Business and Management Research*, 7(6), 241–248.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28.
- Mardiasmo. (2018). *Perencanaan dan Penganggaran Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Musviyanti, F. N. K., Hariman, B., Syakura, M. A., & Yударuddin, R. (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 79–89.
- Purba, I. B. A. H. (2025). Literature review on local government financial performance measurement. *World Journal Of Advanced Research and Reviews*.

- Putra, P. P. M. E., & Dewi, M. H. U. (2018). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(10), 2163–2189
- Ramadhan, M. N., & Rahardjo, S. N. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi (Periode Tahun 2019-2020)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4).
- Razani, F. D., Zakaria, A., & Anggraini, R. (2024). Pagaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(8), 45–54.
- Safa'ah, S., Pratiwi, E., & Ratnawati, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 1(2), 135–144.
- Safitri, I., Hasibuan, B. K., Silalahi, A. S., & Syahyunan. (2021). The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, And Fund for The Results of The District Capital Expenditure Allocation And North Sumatra Province City, 2010–2019. *Journal of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(2), 97–115.
- Syamsul, S. (2020). The evaluation of regional income (pad) in central sulawesi province in 2014-2018. *BAKI Berkala: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5 (1), 47-66 <https://doi.org/10.20473/BAKI.V5I1.17937>
- Wahyudi, S. T., & Kurniawati, L. (2022). The effect of fiscal decentralization on economic growth: A study of the province level in Indonesia. *JEKT (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan)*, 15(1), 37–42.
- Yasin, M. A., & Marwa, N. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 45–56. <https://doi.org/10.12345/jak.v7i2.6289>
- Yuliana, A. S., & Asmara, K. (2024). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah*. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 540–551.